

Salah satu alasan untuk menafsirkan kembali hadis di atas adalah karena seting sejarah ketika Nabi mengatakannya hubungan dasar di antara berbagai kelompok ketika itu didominasi oleh konflik dan perang. Jika seseorang keluar dari sebuah kelompok, maka ia akan bergabung dengan kelompok lain yang pada umumnya menjadi musuh kelompok pertama, dan akan menjadi informan tentang rahasia kelompok yang pertama. Jadi, tindakannya dianggap subversive. Sebaliknya jika hubungan di antara berbagai kelompok (negara) adalah perdamaian, maka tidak ada alasan yang kuat untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap orang yang yang murtad.²² Jika masih memberlakukan hukuman tersebut pada saat negara stabil dan damai, tentu hal tersebut akan menimbulkan pemberontakan terhadap pemerintah dan pada akhirnya pemerintah sendiri yang harus mempertanggung jawabkan.

Praktik penjatuhan hukuman mati bagi orang murtad yang tergambar dalam berbagai peristiwa sepanjang sejarah Rasulullah saw. dan sahabat semuanya menjelaskan bahwa hukuman mati dijatuhkan kepada seseorang yang murtad, bukan semata-mata ia berpindah agama dan keyakinan dari Islam kepada agama lain, melainkan karena orang tersebut telah menyertai kemurtadannya dengan tindakan-tindakan makar, pengkhianatan, permusuhan, dan ikut bergabung dengan golongan kafir menyerang Islam dan kaum Muslimin. Tidak satupun informasi sejarah yang menyebutkan ada orang dijatuhi hukuman mati karena semata-mata ia berpindah agama dari Islam dan

²² Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 143.

